

SANKSI EKONOMI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN PERIODE 2018–2020 DALAM PERSPEKTIF NEOREALISME

Rahmi Fitriyanti¹, Adre Alir²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2}

Abstract

Good relations between the United States (US) and Iran turned complex due to the important events of the 28 Mordad Coup in 1952, the 1979 Iranian Revolution, as well as disputes between the two countries regarding the issue of Iran's nuclear program. This research also explains the impact of US economic sanctions on Iran's economic conditions. However, Iran's response to these sanctions has shown to be ineffective in stopping Iran's nuclear uranium enrichment activities. The Neorealism Perspective is used as a reference in analyzing US economic sanctions against Iran for the 2018–2020 period. Meanwhile, the approach is using a qualitative research method which analysis is focused on gaining a deeper understanding of US economic sanctions against Iran based on the Neorealism Perspective. The findings obtained based on Neorealism show that the emergence of distrust between Iran and the US is due to the absence of authority in the international system. Neorealism views US economic sanctions against Iran during the 2018–2020 period as part of international political dynamics that arise from power competition in an anarchic international system. According to the Neorealism Perspective, large countries such as the US tend to use economic sanctions as a tool to influence other countries and defend their national security interests.

Keywords: *neorealism; nuclear; economic sanctions; Iran; United States of America*

Abstrak

Hubungan baik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berubah menjadi kompleks akibat peristiwa penting Kudeta 28 Mordad pada 1952, Revolusi Iran 1979, serta perselisihan antarkedua negara terkait isu program nuklir Iran. Penelitian ini juga memaparkan dampak atas sanksi ekonomi AS terhadap kondisi ekonomi Iran. Namun, respon Iran terhadap sanksi tersebut menunjukkan tidak efektif dalam menghentikan aktivitas pengadaan uranium nuklir Iran. Perspektif Neorealisme digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis sanksi ekonomi AS terhadap Iran periode 2018–2020. Pendekatan melalui metode penelitian kualitatif yang analisisnya difokuskan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai sanksi ekonomi AS terhadap Iran berdasarkan Perspektif Neorealisme. Hasil temuan yang diperoleh berdasarkan Neorealisme menunjukkan munculnya ketidakpercayaan antara Iran dan AS akibat ketiadaan otoritas dalam sistem internasional. Neorealisme memandang sanksi ekonomi AS terhadap Iran selama periode 2018–2020 sebagai bagian dari dinamika politik internasional yang muncul dari persaingan kekuatan dalam sistem internasional yang anarkis. Menurut Perspektif Neorealisme, negara-negara besar seperti AS cenderung menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi negara-negara lain dan mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya.

Kata kunci: *neorealisme; nuklir; sanksi ekonomi; Iran; Amerika Serikat*

Copyright (c) 2024 Rahmi Fitriyanti¹, Adre Alir².

✉ Corresponding author : Rahmi Fitriyanti
Email Address : pipitfitriyanti77@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketegangan politik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Iran telah menjadi perhatian dunia internasional selama beberapa dekade terakhir. Salah satu instrumen yang digunakan oleh AS dalam menghadapi kebijakan dan program nuklir Iran adalah sanksi ekonomi yang ketat. Sanksi tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Iran selama periode 2018–2020. Dalam konteks ini, tujuan penelitian ini menganalisis sanksi ekonomi AS terhadap Iran dalam periode tersebut dengan menggunakan Perspektif Neorealisme.

Perspektif Neorealisme, juga dikenal sebagai Realisme Struktural, memberikan pemahaman tentang dinamika hubungan internasional berdasarkan struktur sistem internasional yang anarkis. Menurut Neorealisme, negara-negara berperilaku rasional dan berorientasi pada keamanan dan kekuasaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka (Mearsheimer, 2014; Waltz, 1979). Dalam konteks hubungan antara AS dan Iran, Neorealisme sangat relevan digunakan karena ketegangan dan kecurigaan antara kedua negara didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan keamanan nasional serta adanya persaingan untuk menguasai kawasan Timur Tengah.

Pada periode 2018–2020, AS memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Iran, termasuk mengekang ekspor minyak dan membatasi akses ke sektor keuangan global. Sanksi ekonomi ini bertujuan untuk menekan perekonomian Iran, serta membatasi pendanaan program nuklir dan aktivitas destabilisasi Iran di Timur Tengah. Dampak dari sanksi ekonomi ini tampak pada penurunan signifikan ekspor minyak Iran, inflasi yang tinggi, depresiasi mata uang, dan tekanan pada sektor keuangan (Bell, 2020; Abdillah, 2019). Berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini akan mendeskripsikan dampak sanksi ekonomi AS terhadap sektor perekonomian Iran yang difokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi, investasi asing, pengangguran, dan kondisi sosial.

Neorealisme menekankan pentingnya struktur internasional dan anarki sistemik dalam memahami perilaku negara. Dalam konteks ini, Perspektif Neorealisme akan digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan antara AS dan Iran dalam kerangka sistem internasional yang kompleks serta bagaimana sanksi ekonomi AS terhadap Iran dipengaruhi oleh kepentingan keamanan dan kekuasaan kedua negara.

Dengan demikian, Perspektif Neorealisme dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas sanksi ekonomi AS terhadap Iran beserta dampaknya. Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih efektif, serta mampu menawarkan suatu solusi yang berkelanjutan dalam mengelola ketegangan antara AS dan Iran dalam rangka menjaga stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Perspektif Neorealisme

Neorealisme hadir guna memperbaiki dan merevisi Perspektif Realisme Klasik. Neorealisme sering juga disebut sebagai Realisme Struktural karena perspektif ini lebih berfokus kepada struktur internasional yang ada. Menurut ilmuwan politik John Mearsheimer, terdapat lima asumsi penting dalam

Neorealisme, yaitu, sistem internasional yang ada bersifat anarkis; *great powers* memiliki kemampuan ofensif militer dan negara memiliki potensi berbahaya satu sama lain; negara tidak akan bisa mengetahui apakah negara lain berniat ofensif atau tidak; di antara semua tujuan, survival adalah tujuan paling penting bagi *great powers* karena mereka sangat mementingkan keamanan hidup mereka; dan *great powers* adalah aktor yang rasional sehingga setiap negara akan selalu memperhatikan dan memikirkan konsekuensi dari semua langkah yang mereka ambil.

Jika kelima asumsi tersebut digabungkan, maka dapat menjadikan *great powers* berperilaku dengan pola *fear*, *self-help*, dan *power maximization* (Mearsheimer, 2014).

Waltz pernah menyatakan bahwa walaupun setiap negara memiliki perbedaan, tetapi selalu ada kesamaan yang mendasari perilaku negara. Dalam hal ini, Realisme Klasik lebih fokus pada perilaku negara yang dikorelasikan dengan perilaku manusia untuk melihat perbedaan kebijakan antarnegara berdasarkan logika individunya. Waltz mencoba menunjukkan bahwa ada aspek penjas yang sama dari tindakan negara, yaitu struktur sistem internasional (Waltz, 1979).

Perspektif Neorealisme menekankan arti penting struktur atau sistem internasional yang tidak mudah berubah, konstan, dan menekankan pada aktor-aktor internasional (Mearsheimer, 2013). Sejalan dengan Realisme Klasik, maka Neorealisme juga memandang bahwa ciri khas politik internasional adalah adanya upaya berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan (Dunne & Schmidt, 2014).

Perilaku negara cenderung dipengaruhi oleh struktur internasional yang menjadi arena bagi politik internasional. Dalam hal ini, Neorealisme memandang politik internasional sebagai *struggle for power* yang meyakini bahwa perilaku negara yang cenderung konfliktual lebih disebabkan karena struktur internasional yang anarkis daripada sifat dasar manusianya itu sendiri (James, 2002).

Menurut Neorealis, kecurigaan antarnegara di level internasional disebabkan oleh ketiadaan otoritas. Kondisi tersebut membuat setiap negara harus menolong dirinya sendiri agar tidak menjadi korban dari perilaku negara lain. Kondisi anarki di dalam sistem internasional memaksa negara untuk melakukan apapun demi menjamin ketahanan hidup negaranya, meskipun menimbulkan konsekuensi dengan meningkatnya kemungkinan konflik antarnegara. Kondisi sistem yang anarki juga memaksa negara untuk memaksimalkan keamanannya dan menjadi curiga terhadap negara lainnya (Waltz, 1979).

Pada level politik internasional, kedua negara antara Iran dan Amerika Serikat tersebut saling mencurigai satu sama lain. Perilaku Iran yang senantiasa meningkatkan jumlah uranium nuklirnya dan melanggar kesepakatan *Non-Proliferation Treaty (NPT)* akibat munculnya ketidakpercayaan dan ketiadaan otoritas internasional atau akibat struktur yang anarkis.

Dalam hal ini, Neorealisme menekankan bahwa negara-negara dalam sistem internasional berusaha untuk memaksimalkan keamanan dan kekuasaan mereka sendiri, di mana penggunaan sanksi ekonomi adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Neorealisme

memandang sanksi ekonomi AS terhadap Iran pada periode 2018–2020 sebagai bagian dari dinamika politik internasional yang muncul dari persaingan kekuatan di dalam sistem internasional yang anarkis.

Oleh karena itu, berdasarkan Perspektif Neorealisme, negara adikuasa Amerika Serikat cenderung menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi negara-negara lain dan mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya. Dalam kasus sanksi ekonomi AS terhadap Iran selama 2018–2020, Neorealisme memandangnya sebagai upaya AS untuk menekan Iran dan membatasi potensi pengembangan senjata nuklir atau pengaruh Iran di kawasan. Sanksi-sanksi tersebut diberlakukan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran Iran terhadap perjanjian nuklir. Selain itu, sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri AS yang difokuskan pada kepentingan keamanan nasionalnya.

Merujuk pada Perspektif Neorealisme, sanksi ekonomi tidak selalu berhasil dalam mencapai tujuannya karena negara-negara yang dikenai sanksi sering kali mencari cara-cara lain untuk mengatasi dampak atas pembatasan akibat sanksi tersebut. Dalam hal ini, Iran merespons sanksi ekonomi dengan melanjutkan aktivitas pengayaan uranium dan meningkatkan program nuklirnya, yang menunjukkan bahwa sanksi tersebut tidak efektif dalam mengubah perilaku Iran.

Secara keseluruhan, Neorealisme memberikan pandangan tentang sanksi ekonomi AS terhadap Iran periode 2018–2020 sebagai bagian dari dinamika kekuatan politik dalam sistem internasional yang anarkis. Perspektif ini menyoroti peran ketidakpercayaan, keamanan nasional, dan persaingan kekuatan di antara *great powers* dalam mempengaruhi hubungan internasional melalui instrumen sanksi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif eksplanatif. Metode riset kualitatif ini sejalan dengan pandangan Creswell bahwa penelitian kualitatif cenderung bergantung pada data teks dan gambaran yang beragam dalam upaya analisis datanya (Creswell, 2017).

Sementara itu, sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pemerintahan Trump, sejumlah perjanjian nuklir, serta pernyataan resmi yang disampaikan oleh pemimpin kedua negara dan diperoleh dari jurnal internasional maupun jurnal nasional, situs internet, pemberitaan di media massa dan media *online*, *website*, *e-book*, serta sejumlah buku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Iran dan Amerika Serikat

Pada awalnya, hubungan AS dan Iran terjalin dengan baik. Terutama ketika pemerintahan Iran berada di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlavi, Iran menjadi kolega penting bagi AS, khususnya dalam bidang ekonomi. Namun, kemudian terjadi dinamika dalam hubungan antara Iran dan AS tersebut.

Peristiwa Kudeta 28 Mordad pada 1952 menjadi latar belakang memburuknya hubungan AS dan Iran. Kudeta berawal dari terpilihnya Mohammad Mosaddegh sebagai Perdana Menteri Iran. Saat itu, Mosaddegh menasionalisasi tambang minyak terbesar Iran yang berada di bawah kekuasaan Inggris melalui *Anglo-Persian Oil Company*. Menurut AS, hal tersebut berpotensi membuat Iran dapat membangun perekonomiannya kembali pasca Perang Dunia II (Allen-Ebrahimian, 2017). Peristiwa kudeta ini kemudian mempengaruhi hubungan Iran dan AS sejak 1979.

Revolusi Iran yang terjadi pada 1979 merupakan peristiwa pengambilalihan kekuasaan oleh Ayatullah Khomeini yang disertai pemogokan massal yang berdampak buruk bagi instansi pendidikan, bank, media, pertambangan, perusahaan industri, dan lalu lintas. Pada peristiwa tersebut juga terjadi penyerangan terhadap Kedutaan Besar AS di Teheran, di mana para revolusioner menganggap AS selalu ikut campur masalah domestik Iran (Sreberny, 2021). Tidak hanya peristiwa kudeta dan revolusi saja, hubungan AS dan Iran pun mengalami perselisihan karena masalah nuklir.

Nuklir Iran dan Sanksi AS Periode 2018–2020

Terkait dengan program nuklir, Iran telah memulai program nuklirnya sejak kepemimpinan Shah Reza Pahlevi. Namun, program nuklir dihentikan ketika Iran dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Pada akhir 1980-an, Iran kembali mengaktifkan program nuklirnya dengan bantuan China, Rusia, dan AQ Khan Network (Bell, 2020; Hoell, 2018), di mana Iran kemudian mengembangkan infrastruktur penambangan uranium, serta bereksperimen dengan berbagai upaya konversi dan pengayaan uranium. Bantuan dari China, Rusia, dan AQ Khan membuat program nuklir Iran semakin berkembang dan maju. Akibatnya, hal ini membuat badan intelijen AS mencurigai Iran telah menggunakan program nuklir sipilnya sebagai “kedok” untuk pengembangan senjata pemusnah massal. Namun, Iran selalu mengatakan bahwa program nuklirnya semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan energi.

Di sisi lain, AS menilai bahwa pengembangan nuklir Iran yang terus dilakukan dianggap melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam *Non-Proliferation Treaty (NPT)*. Sehingga, AS berpendapat bahwa diperlukan cara lain untuk menghentikan pengayaan uranium tersebut.

Kemudian, pada Juli 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pertamanya yang menuntut Iran untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Resolusi Dewan Keamanan tersebut menuntut agar Iran menghentikan kegiatan pengayaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran (Starr, 2010). Tetapi, pada September 2009, Presiden AS Barack Obama mengungkapkan keberadaan fasilitas pengayaan bawah tanah di Fordow, dekat Qom. Keputusan Iran untuk membangun lagi fasilitas nuklirnya tanpa memberi tahu *International Atomic Energy Agency (IAEA)* dianggap sebagai bentuk tantangan langsung kepada negara-negara non-Amerika. Untuk itulah, diperlukan tindak lanjut untuk menangani Iran. Salah satunya dengan membentuk suatu perjanjian nuklir yang komprehensif (Dobbins, 2011).

Gambar 1. Fasilitas Nuklir Iran



Sumber: United Against Nuclear Iran

Akhirnya, pada 2015, Iran bersedia menandatangani perjanjian nuklir *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* setelah Presiden AS, Barack Obama, mengajak Iran bernegosiasi terkait program nuklir Irak tersebut. Sejumlah aktor negara yang tergabung dalam JCPOA adalah Uni Eropa dan negara-negara P5+1, yaitu, AS, China, Rusia, Prancis, Inggris, dan Jerman. Isi perjanjian tersebut mengatur Iran untuk mengurangi pengayaan uraniumnya dan tidak melakukan pembangunan fasilitas uranium melebihi 3,67% (Dobbins, 2011).

Terbentuknya JCPOA ini tentu memiliki dampak bagi sebagian negara di dunia, dan khususnya bagi Iran. Terutama ketika dalam perjalanannya AS kemudian memutuskan untuk keluar dari perjanjian tersebut. Keluarnya AS dari perjanjian JCPOA ini terjadi pada kepemimpinan AS berikutnya, yaitu saat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Pada 8 Mei 2018, Trump menarik AS dari perjanjian JCPOA. Tak hanya itu, AS pun memberlakukan sanksi embargo bagi Iran. Sanksi ekonomi AS ini bukanlah sanksi yang pertama kalinya dikenakan terhadap Iran. Akan tetapi, kali ini selain memberi sanksi, AS juga sekaligus menyatakan keluar dari JCPOA secara resmi. Salah satu dari sanksi ekonomi AS adalah kebijakan *Significant Reduction Exceptions (SREs)* yang tidak hanya melibatkan Iran, tetapi juga India, China, Jepang, Korea Selatan, Turki, Yunani, Taiwan, dan Italia yang merupakan negara pengimpor minyak Iran. Dengan demikian, tampak jelas bahwa sanksi ini bertujuan untuk menekan ekspor minyak Iran ke titik nol atau *export to zero*, di mana ekspor minyak bumi merupakan sumber utama pendapatan Iran. Berdasarkan sanksi itu, AS melarang negara-negara tersebut membeli minyak dari Iran. Jika mereka tetap mengimpor minyak Iran, maka AS juga akan memberlakukan sanksi terhadap mereka (Bell, 2020).

Pemerintahan Trump telah memberlakukan lebih dari 1.500 sanksi terhadap Iran, perusahaan asing, atau individu yang berhubungan dengan Iran sepanjang periode 2018 hingga 2021. Sanksi ini merupakan bagian dari "*maximum pressure*" atau "tekanan maksimum" yang diberlakukan Trump setelah menarik AS dari JCPOA. Sanksi tersebut dikaitkan dengan satu atau lebih dari lima masalah, yaitu program nuklirnya yang kontroversial, pengembangan dan pengujian rudal balistik, intervensi di wilayah Timur Tengah, serta dukungan untuk milisi proksi ekstremis, serangan dunia maya, dan pelanggaran hak asasi manusia (Hanna, 2021).

Sanksi yang diberlakukan terhadap Iran selama pemerintahan AS berada di bawah kepemimpinan Trump tersebut kemudian diperluas mencakup sektor bisnis di setidaknya 21 negara, termasuk Armenia, Bahrain, Belgia, Inggris, Brunei, Cina, Gambia, Jerman, India, Irak, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Rusia, Seychelles, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini juga termasuk perusahaan yang berhubungan dengan Iran. Selain itu, pemerintahan Trump juga mengambil tindakan yang tidak biasa dengan memberikan sanksi di sektor perbankan maupun sektor minyak Iran karena dukungannya terhadap kegiatan teroris Pengawal Revolusi dan pasukan proksi mereka (Hanna, 2021).

Presiden Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan kembali sanksi yang dicabut berdasarkan Kesepakatan Nuklir 2015. Gelombang pertama sanksi menargetkan perdagangan emas, logam industri, sektor otomotif, dan aset mata uang asing Iran. Departemen Keuangan memberlakukan kembali sisa sanksi terhadap Iran yang telah dicabut pada Januari 2016. Sanksi tersebut menargetkan industri perbankan, perkapalan, dan penerbangan Iran. Kantor Pengawasan Aset Asing memberikan sanksi kepada lebih dari 700 individu, entitas, pesawat terbang, dan kapal (Hanna, 2021).

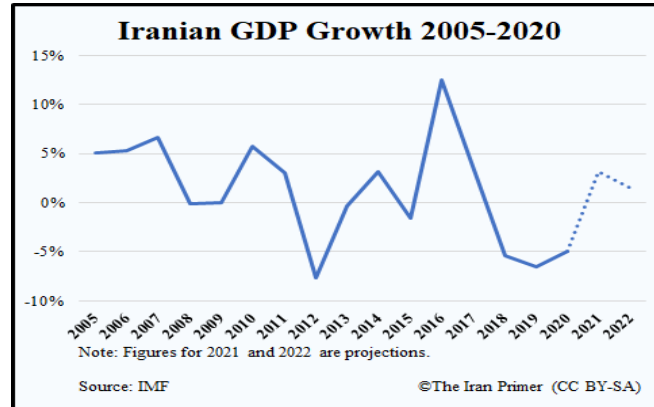
Berikut ini perintah eksekutif atau *executive order* pada pemerintahan Trump (United States Institute of Peace, 2021):

- 1) *Executive Order* 13846 (2018): Menerapkan kembali sanksi yang dicabut sebagai bagian dari JCPOA,
- 2) *Executive Order* 13871 (2019): Memblokir perdagangan antara AS dan industri besi, baja, aluminium, dan tembaga Iran. Selain itu, mengancam memberikan sanksi terhadap bank asing yang membantu perdagangan dengan sektor industri tersebut,
- 3) *Executive Order* 13876 (2019): Memberikan sanksi kepada aset, jabatan, dan siapa pun yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei atau siapa pun yang mendukungnya dalam jabatannya. Selain itu, bank tidak boleh melakukan transaksi yang berkaitan dengan dengan jabatan pimpinan atau orang yang ditunjuknya. Perintah Trump ini menyebabkan pemberian sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran, yaitu Mohammad Javad Zarif.
- 4) *Executive Order* 13902 (2020): Memblokir transaksi dan akses ke sistem keuangan AS bagi setiap individu atau entitas yang beroperasi di sektor konstruksi, manufaktur, tekstil, atau pertambangan di Iran.
- 5) *Executive Order* 13949 (2020): Mengesahkan sanksi terhadap individu atau entitas asing yang mendukung kegiatan terkait nuklir, misil, dan senjata konvensional Iran. Sanksi tersebut disertai penolakan Dewan Keamanan PBB terhadap upaya pemerintahan Trump untuk memberlakukan kembali sanksi "*snapback*" yang telah dicabut oleh PBB sebagai bagian dari Kesepakatan Nuklir 2015.

Menurut *United Against Nuclear Iran (UANI)*, pada 2019 ekspor minyak Iran turun dari 2,07 juta barel per hari menjadi 0,97 juta barel per hari (Jungman & Canto, 2022; Rome, 2022). Yunani, Taiwan, dan Italia telah menghentikan impornya dari Iran, sementara China dan India sebagai pengimpor minyak terbesar Iran telah mengurangi impor mereka sebesar 39% dan 47% (Vakhshouri, 2018). Akibat dari sanksi ekonomi yang dikenakan AS terhadap Iran berdampak

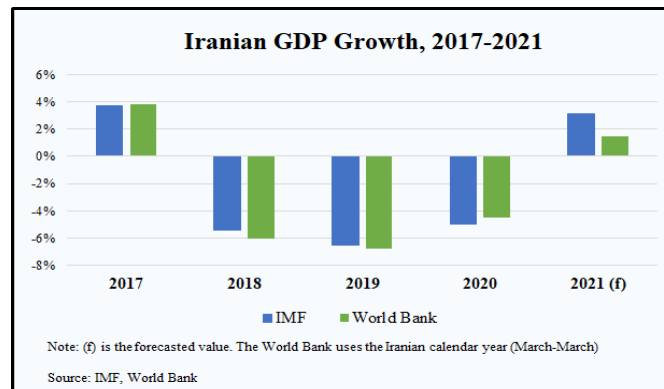
pada memburuknya kondisi ekonomi Iran, produksi minyak menurun, Produk Domestik Bruto (PDB) Iran menurun, mata uang Iran melemah, serta meningkatnya inflasi. Hal inilah yang membuat perusahaan-perusahaan asing berencana untuk keluar dari Iran (Abdillah, 2019).

Grafik 1. Pertumbuhan PDB Iran Periode 2005–2020



Sumber: *International Monetary Fund; United States Institution of Peace*

Grafik 2. Pertumbuhan PDB Iran Periode 2017–2021



Sumber: IMF; World Bank; USIP

Sejak April 2020, mata uang Iran telah kehilangan setengah nilainya. Pembatasan akses ke cadangan devisa juga menyebabkan depresiasi nilai tukar yang kemudian meningkatkan inflasi. Tak hanya inflasi, pandemi yang kemudian terjadi sejak akhir 2019 juga memperburuk keadaan ekonomi Iran (Cordesman, 2021).

Grafik 3. Tingkat Inflasi Iran Periode 2005–2020



Sumber: IMF; USIP

Namun, tampaknya sanksi ekonomi AS tersebut tidak efisien jika dilihat berdasarkan respon Iran yang kembali melakukan pengayaan uranium melebihi batas yang ditentukan JCPOA, yakni hingga 5% dan diprediksi akan mencapai 20% pada akhir 2019 (Abdillah, 2019). Hingga pada akhirnya, sanksi AS berupa embargo ekonomi terhadap Iran tersebut kemudian berakhir pada Oktober 2020 (Torbat, 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sanksi ekonomi AS terhadap Iran yang merujuk pada Perspektif Neorealisme di atas menghasilkan temuan bahwa Neorealisme telah memberikan wawasan penting dalam memahami hubungan internasional beserta dinamika kekuatan yang ada di antara negara-negara besar lainnya secara lebih mendalam. Merujuk pada perspektif tersebut, maka sanksi ekonomi AS terhadap Iran pada periode 2018–2020 mengindikasikan suatu dinamika politik internasional yang muncul dari persaingan kekuatan di dalam sistem internasional yang anarkis.

Sanksi tersebut merupakan upaya AS untuk menekan Iran dalam upayanya membatasi pengembangan senjata nuklir atau pengaruh regional Iran yang difokuskan pada kepentingan keamanan nasional. Namun, sanksi ekonomi terkadang juga tidak selalu berhasil dalam mencapai tujuannya. Iran merespons sanksi tersebut dengan tetap melanjutkan aktivitas pengayaan uraniumnya dan meningkatkan program nuklirnya. Respon Iran tersebut menunjukkan bahwa ternyata sanksi ekonomi tersebut tidak efektif dalam mengubah perilaku Iran. Fakta ini menegaskan pentingnya memahami bahwa negara-negara akan mencari cara lain untuk mengatasi pembatasan yang diberlakukan oleh sanksi ekonomi.

Selain itu, Perspektif Neorealisme juga menyoroti pentingnya struktur atau sistem internasional dalam mempengaruhi perilaku suatu negara. Ketiadaan otoritas dalam sistem internasional menyebabkan ketidakpercayaan antarnegara sehingga membuat negara-negara saling curiga serta berupaya memaksimalkan keamanan dan kekuasaan mereka.

Dalam konteks hubungan antara Iran dan AS, Perspektif Neorealisme memberikan pemahaman tentang dinamika persaingan kekuatan akibat timbulnya ketidakpercayaan antarnegara. Perilaku Iran yang melanggar perjanjian nuklir dan meningkatkan program nuklirnya tersebut tentu terkait dengan ketiadaan otoritas dalam sistem internasional yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk meningkatkan keamanan nasionalnya.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Perspektif Neorealisme telah memberikan pandangan dan wawasan yang sangat penting mengenai adanya kompleksitas dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika kekuatan antarnegara dalam konteks sistem internasional yang anarkis menjadi sangat penting menurut perspektif ini. Dalam konteks sanksi ekonomi AS terhadap Iran, Neorealisme sangat relevan digunakan dalam menganalisis dampak ekonomi atas sanksi tersebut serta respon Iran terhadap sanksi yang diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Abdillah, M. F. (2019). *Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Mundurnya Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Aggarwal, V., & Reddie, A. (2021). Economic Statecraft in the 21st Century: Implications for the Future of the Global Trade Regime. *World Trade Review*, 20(2), 137-151. doi:10.1017/S147474562000049X
- Allen-Ebrahimian, B. (2017, June 20). 64 Years Later, CIA Finally Releases Details of Iranian Coup. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2017/06/20/64-years-later-cia-finally-releases-details-of-iranian-coup-iran-tehran-oil/>
- Baldwin, D. A. (1999). The Sanctions Debate and the Logic of Choice. *International Security*, 24(3), 80-107. <http://www.jstor.org/stable/2539306>
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft*. Princeton University.
- Belal, K. (2019). Uncertainty over the Joint Comprehensive Plan of Action: Iran, the European Union and the United States. *Policy Perspectives*, 16(1), 23-39. <https://doi.org/10.13169/polipers.16.1.0023>
- Bell, M. S. (2020). The Iranian Nuclear Program. In *United States Interests and Policy Choices in the Middle East: We didn't start the fire...* (pp. 35-42). Atlantic Council. <http://www.jstor.org/stable/resrep29475.8>
- Cordesman, A. H. (2021). *Iran and U.S. Strategy: Looking beyond the JCPOA*. Center for Strategic and International Studies (CSIS). <http://www.jstor.org/stable/resrep33139>
- Davenport, K. (2018). Iran Vows to Resist U.S. Sanctions. *Arms Control Today*, 48(10), 23-24. <https://www.jstor.org/stable/90026589>
- Drezner, D. W. (2011). Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice. *International Studies Review*, 13(1), 96-108. <http://www.jstor.org/stable/23016144>
- Dunne, Tim & Schmidt, Brian C., (2014), "Realism", dalam John Baylis, et al, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, (ed.), 6th edition, Oxford University Press.
- Hoell, M. (2018). *If the JCPOA Collapses: Implications for Nuclear Non-Proliferation and International Security*. European Leadership Network. <http://www.jstor.org/stable/resrep22129>
- James, Patrick, (2002), *International Relations and Scientific Progress: Structural Realism Reconsidered*, Ohio State University Press.
- Katzman, K., McInnis, K. J., & Thomas, C. (2019). *US-Iran conflict and implications for US Policy*. Congressional Research Service.
- Masterson, J. (2020). U.S. Aims to Extend Iran Embargo. *Arms Control Today*, 50(5), 29-31. <https://www.jstor.org/stable/26975370>
- Mearsheimer, J. J. (2014). Anarchy and the Struggle for Power. In *Realism Reader* (pp. 179-187). Routledge.
- Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2013). Leaving theory behind: Why simplistic hypothesis testing is bad for International Relations. *European Journal of International Relations*, 19(3), 427-457.

- Newcomb, D., & Lee, C. (2016). Iran Sanctions: What's Old Is New Again. *Business Law Today*, 1–4. <https://www.jstor.org/stable/businesslawtoday.2016.08.05>
- Raco, J. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Grasindo Widiasarana Indonesia.
- Sumarno, W. F. (2020). Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979. *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2), 145-158.
- Torbat, A. E. (2005). Impacts of the US trade and financial sanctions on Iran. *World Economy*, 28(3), 407-434.

E-book

- Bryman, A. (2004). *Social Research Methods*, Second Edition. New York: Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Davis, L. E., Martini, J., Nader, A., Kaye, D. D., Quinlivan, J. T., & Steinberg, P. (2011). Approaches to Influencing Iran. In *Iran's Nuclear Future: Critical U.S. Policy Choices* (pp. 67–72). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1087af.14>
- Denzin, N., & Lincoln, Y.S. (2004). *Strategies of qualitative inquiry* (2nd ed.). London: Sage.
- Dobbins, J., Nader, A., Kaye, D. D., & Wehrey, F. (2011). U.S. Interests, Objectives, and Strategies. In *Coping with a Nuclearizing Iran* (pp. 3–8). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg1154srf.8>
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Morgan, F. E., Mueller, K. P., Medeiros, E. S., Pollpeter, K. L., & Cliff, R. (2008). Regional Nuclear Powers. In *Dangerous Thresholds: Managing Escalation in the 21st Century* (1st ed., pp. 83–116). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg614af.11>
- Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin.
- Mulyana, D. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru ilmu Komunikasi dan migogial tainnya*. Bandung: PT Remaja Kosda Karys.
- Reardon, R. J. (2012). Iran's Nuclear Program: Past, Present, and Future. In *Containing Iran: Strategies for Addressing the Iranian Nuclear Challenge* (pp. 9–64). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1q60rb.10>
- Sreberny, Annabelle, and Gholam Khiabany. "Where Is Iran?: Politics between State and Nation, Inside and Outside the Polity." In *Media and Mapping Practices in the Middle East and North Africa: Producing Space*, edited by Alena Strohmaier and Angela Krewani, 261–82. Amsterdam University Press, 2021. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1hw3z0w.16>.
- Walt, S. (2016). Can the United States "Manage" the Middle East?: Should It Try? In T. E. Phillips, P. J. Miano, & J. Mitchell (Eds.), *Prophetic Voices on Middle East Peace: A Jewish, Christian, and Humanist Primer on Colonialism, Zionism, and Nationalism in the Middle East* (Vol. 1, pp. 97–118). Claremont Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvbcd292.9>
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*, McGraw Hill

Wehrey, F., Thaler, D. E., Bensahel, N., Cragin, K., Green, J. D., Kaye, D. D., Oweidat, N., & Li, J. (2009). Asymmetric Ambition and Conventional Reality: Iran's Evolving Defense Strategy, Doctrine, and Capabilities. In *Dangerous But Not Omnipotent: Exploring the Reach and Limitations of Iranian Power in the Middle East* (pp. 39-80). RAND Corporation. <http://www.jstor.org/stable/10.7249/mg781af.11>

Report

Miller, S. E., Shaffer, B., & Kane, C. Z. (2018). The Forgotten Threat? Iran and Weapons of Mass Destruction. Cambridge: Harvard College. Harvard Kennedy of Belfer Center: <https://www.belfercenter.org/publication/forgotten-threat-iran-and-weapons-mass-destruction>

Website

Hanna, A. (2021). Sanction 5: Trump's Maximum Pressure Targets. United States Institute of Peace. <https://iranprimer.usip.org/blog/2021/mar/03/sanctions-5-trumps-maximum-pressure-targets>

Jungman, C., & Canto, J. (2022). Analysis of Iranian Oil Sales under President Trump vs. President Biden. United Against Nuclear Iran: <https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/analysis-of-iranian-oil-sales-under-president-trump-vs-president-biden>

Rome, H. (2022). Iran's Oil Exports Are Vulnerable to Sanctions. The Washington Institute for Near East Policy: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-oil-exports-are-vulnerable-sanctions>

Starr, J. (2010). The Iran Primer: The U.N. Resolution. United States Institute of Peace: <https://iranprimer.usip.org/resource/un-resolutions>

United States Institute of Peace. (2021). The Iran Primer: Sanction 8: Timeline of Sanctions. Diakses dari <https://iranprimer.usip.org/blog/2021/mar/03/sanctions-8-timeline-sanctions>